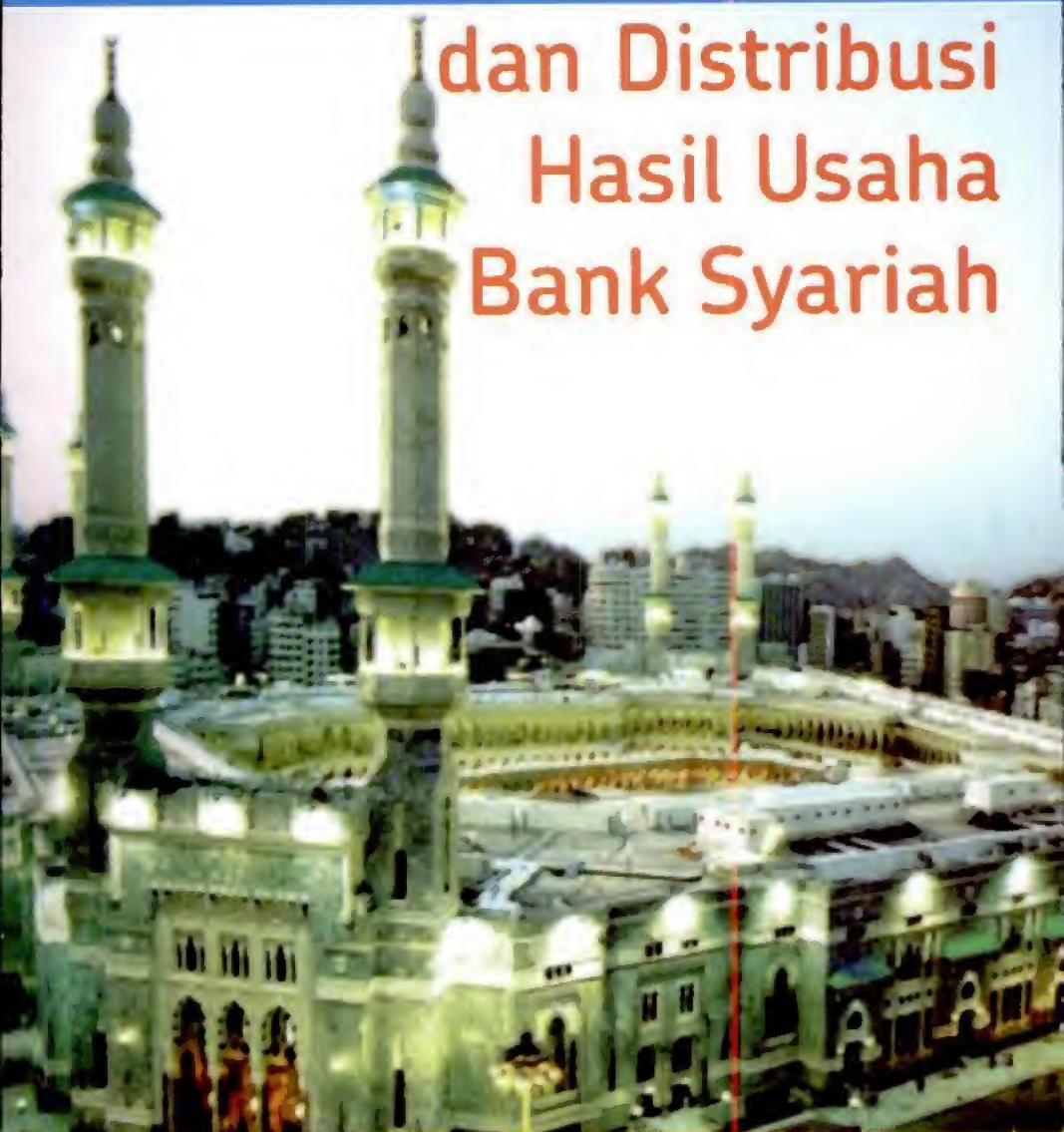


Penghimpunan Dana

dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah



Wiroso, S.E., M.B.A

Seri Perbankan Syariah
PENGHIMPUNANDANA
DAN DISTRIBUSI HASIL USAHA
BANK SYARIAH

© Wiroso, S.E., M.B.A.

(Manajemen Penulis oleh Cikal Sakti)

GM501 05.338

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

Editor : Surya Ubha

Editor Penyelia : Murtanto, Abubakar Arif dan Wibowo

Penata Isi : Iwan Kurniawan

Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit PT Grasindo,
anggota Ikapi, Jakarta, 2005

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apa pun (seperti cetak, fotokopi, mikrofilm, VCD, CD-ROM,
dan rekaman suara) tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Isi di luar tanggung jawab Percetakan PT Gramedia, Jakarta

Daftar Isi

BAB 1 OPERASIONAL BANK SYARIAH	1
1.1 PENGERTIAN DAN LANDASAN	
HUKUM BANK SYARIAH	1
1.2 FUNGSI BANK SYARIAH	4
1.2.1 Manager Investasi	5
1.2.2 Investor	10
1.3 ALUR OPERASIONAL BANK SYARIAH ..	11
 BAB 2 PENGHIMPUNAN DANA	 19
2.1 PENDAHULUAN	19
2.2 PENGHIMPUNAN DANA PRINSIP	
WADIAH	20
2.3 PENGHIMPUNAN DANA PRINSIP	
MUDHARABAH	32
2.3.1 Pengertian <i>Mudharabah</i>	33
2.3.2 Karakteristik <i>Mudharabah</i>	38
2.3.3 Aplikasi <i>Mudharabah</i>	46
 BAB 3 PERHITUNGAN PEMBAGIAN	
HASIL USAHA	88
3.1 PENDAHULUAN	88

3.2 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERHITUNGAN DISTRIBUSI HASIL USAHA	90
3.2.1 Besaran kontribusi investasi (bobot sumber dana)	91
3.2.2 Penentuan sumber dana yang diikutsertakan dalam perhitungan distribusi hasil usaha (<i>profit distribution</i>)	92
3.2.3 Jenis penyaluran dana dan pendapatannya	95
3.2.4 Penentuan pendapatan yang dibagikan	97
3.2.5 Pemisahan jenis valuta	108
3.2.6 Nisbah yang disepakati di awal perjanjian	108
3.2.7 Kebijakan Akuntansi	108
3.3 DISTRIBUSI HASIL USAHA BANK SYARIAH NEGARA LAIN	109
3.3.1 <i>Kuwait Finance House</i>	109
3.3.2 <i>Faysal Islamic Bank of Sudan</i>	110
3.3.3 <i>Al Tadhamon Islamic Bank of the Sudan</i>	111
3.3.4 <i>Jordan Islamic Bank</i>	112
3.3.5 Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)	113
3.4 TAHAPAN PERHITUNGAN DISTRIBUSI HASIL USAHA	114
3.4.1 Penentuan Jenis Prinsip Distribusi Hasil Usaha	115
3.4.2 Perhitungan Porsi Pendapatan yang Dibagihasilkan	115
3.4.3 Perhitungan Pendapatan Kelompok Jenis Dana	116
3.4.4 Perhitungan Bagi Hasil Individu	116
3.5 JENIS PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA	116
3.5.1 Prinsip Bagi Hasil (<i>Revenue Sharing</i>)	120
3.5.2 Prinsip Bagi Untung (<i>Profit sharing</i>)	122

3.6 PERHITUNGAN HASIL USAHA (PENDAPATAN) YANG DIBAGI- HASILKAN	36
3.6.1 Perhitungan Sumber Dana	135
3.6.2 Perhitungan Penyaluran Dana dan Pendapatan	137
3.6.3 Perhitungan Pendapatan yang Dibagihasilkan	139
3.7 PERHITUNGAN DISTRIBUSI HASIL USAHA UNTUK KELOMPOK DANA	148
3.8 CONTOH PERHITUNGAN DISTRIBUSI HASIL USAHA	154
3.8.1 Data-data Perhitungan Pembagian Hasil Usaha	154
3.8.2 Perhitungan Hasil Usaha yang Akan Dibagikan	156
3.8.3 Perhitungan Pendapatan Untuk Kelompok Dana	157
3.8.4 Perhitungan Porsi Pendapatan <i>Shahibul Maal</i> Kelompok Dana (PSKD) dan Porsi Bank .	159
3.8.5 Perhitungan <i>return</i> (indikasi <i>rate</i>)	160
3.8.6 Perhitungan bagi hasil untuk individu rekening tabungan	165
3.8.7 Contoh Perhitungan Bagi Hasil Individu Rekening Tabungan <i>Mudharabah</i> dengan <i>Nisbah</i> Umum / normal	167
3.8.8 Contoh Perhitungan Bagi Hasil Individu Rekening Tabungan dengan <i>Nisbah</i> Khusus/ <i>Special Nisbah</i> (<i>Nisbah</i> yang Berbeda dengan <i>Nisbah</i> Umum)	168
3.8.9 Contoh Perhitungan Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> Pembayaran Bagi Hasil Setiap Ulang Tanggal Investasi	169

3.8.10	Contoh Perhitungan Bagi Hasil Deposito, Pembayaran Setiap Akhir Bulan dengan <i>Nisbah</i> Normal	171
3.8.11	Contoh Perhitungan Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> , pembayaran setiap "ulang tanggal" dengan <i>special</i> nisbah	173
3.8.12	Contoh Perhitungan Bagi Hasil deporan yang memiliki special nisbah dan dibayarkan setiap akhir bulan	174

BAB 4 AKUNTANSI PENGHIMPUNAN DANA DAN BAGI HASIL.....

4.1	PENDAHULUAN	177
4.2	STANDAR AKUNTANSI	177
4.2.1	Pengakuan dan Pengukuran	177
4.2.2	Penyajian	178
4.2.3	Pengungkapan	178
4.3	PERLAKUKAN AKUNTANSI DAN CONTOH KASUS	179
4.3.1	Akuntansi Penghimpunan Dana <i>Wadiah</i> ..	180
4.3.2	Akuntansi Deposito <i>Mudharabah</i>	186
4.3.3	Akuntansi Tabungan <i>Mudharabah</i>	191
4.3.4	Akuntansi Surat Berharga	195

Lampiran

TITIPAN IDA'	196
MUDHAROBAB (BAGI HASIL)	217
Aturan Hukum Pemilik Rekening Investasi dan Setaranya	263
Pengungkapan Dasar-dasar Alokasi Keuntungan	272
Daftar Pustaka	277
Biografi	279

Bab 1

OPERASIONAL BANK SYARIAH

1.1. PENGERTIAN DAN LANDASAN HUKUM BANK SYARIAH

Pengertian Perbankan menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Jenis-jenis bank menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 adalah sebagai berikut.

1. Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 Undang-undang Nomor 7/1992 tentang Perbankan).
2. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan hal itu (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7/1992 tentang Perbankan).

Apabila hanya melihat pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, memang tidak ada aturan tentang Bank Syariah (khususnya bank umum syariah), karena dalam undang-undang tersebut secara umum hanya menjelaskan tentang perbankan konvensional, kecuali dalam Pasal 13.c yang mengatur tentang Usaha Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip bagi hasil. Bank Syariah pertama berdiri di Indonesia sekitar tahun 1992 didasarkan pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 sebagai

landasan hukum bank dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip bagi hasil sebagai landasan hukum Bank Umum Syariah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip bagi hasil sebagai landasan hukum Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Sesuai dengan perkembangan perbankan maka Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan juga tercakup hal-hal yang berkaitan dengan perbankan syariah.

Dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Pasal 1 pengertian bank, bank umum, dan Bank Perkreditan Rakyat disempurnakan menjadi sebagai berikut.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sedangkan pengertian Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau "berdasarkan prinsip usaha syariah" yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Serta pengertian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR-Syariah) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Selain itu, yang dimaksud dengan prinsip syariah dijelaskan pada Pasal 1 butir 13 Undang-undang tersebut, yakni sebagai berikut.

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip

penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 maka Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1998 dan sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tersebut, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan mengeluarkan beberapa ketentuan berkaitan dengan perbankan syariah, yaitu Bank Umum Syariah, BPR Syariah, dan Bank konvensional.

1. Bank Umum Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tertanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Ketentuan ini merupakan penyempurnaan ketentuan lama yang telah dicabut, yaitu meliputi

- a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 32/2/UPPB tertanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, dan
- b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tertanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

2. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR-Syariah)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Ketentuan ini merupakan penyempurnaan ketentuan lama yang telah dicabut, yaitu meliputi.

- a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 32/4/UPPB tertanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, dan



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

dampak dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah yang bersangkutan.

Dari empat fungsi bank syariah berikut akan dibahas dua, yaitu

1. fungsi manager investasi, dan
2. fungsi investor yang berhubungan dengan pembagian hasil usaha (*profit distribution*) yang dilakukan oleh bank syariah.

Disamping dua fungsi lainnya, yaitu fungsi sosial dan jasa keuangan (perbankan).

1.2.1. Manager Investasi.

Salah satu fungsi bank syariah yang sangat penting adalah sebagai manager investasi. Bank syariah merupakan manager investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dari dana yang dihimpun (dalam perbankan lazim disebut dengan deposit atau penabung), karena besar-kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana tersebut sangat tergantung pada pendapatan yang diterima oleh bank syariah dalam mengelola dana *mudharabah* sehingga sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Bank syariah dapat menghimpun dana yang besar, kemudian dalam penyaluran dana dilakukan tidak efektif, kurang memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, sembarangan banyak yang macet atau banyak yang dikategorikan dalam *non performing*, banyaknya penyaluran dana yang tidak melakukan pembayaran angsuran maka membawa dampak pendapatan yang diikuti aliran kas masuk (*cash basis*) hanya sedikit yang diterima. Dengan adanya pendapatan yang *cash basis* sedikit maka pendapatan yang akan dibagi antara bank syariah dan *shahibul maal* juga sedikit, yang akhirnya membawa dampak kecilnya pendapatan yang diterima oleh pemilik dana (*shahibul maal*). Begitu sebaliknya, penyaluran dana yang tidak besar, namun dilakukan dengan efektif, efisien, dan produktif, serta kualitas penyaluran dana yang baik sehingga banyak debitur yang melakukan pembayaran angsuran atau pembayaran bagi hasil yang cukup banyak akan

membawa dampak pada pendapatan yang akan dibagi antara bank syariah dan pemilik dana juga besar, yang mengakibatkan pendapatan diterima pemilik dana cukup besar. Dana yang dihimpun oleh bank syariah, hendaknya ditanamkan pada sektor yang produktif dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

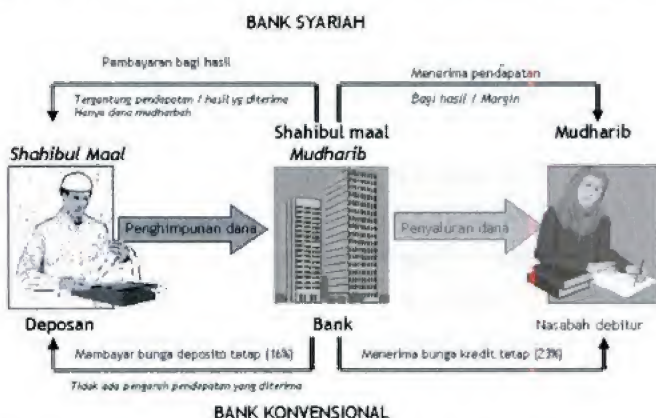
Jadi, apa yang dilakukan oleh bank syariah, khususnya yang berkaitan dengan penyaluran dana akan membawa dampak atau risiko kepada pemilik dana (*shahibul maal*) dari dana yang dihimpun (deposan atau penabung *mudhabah*). Hal ini sangat berbeda dengan bank konvensional, begitu deposan memberikan dana kepada bank konvensional dan dijanjikan bunga tertentu, deposan tidak menanggung risiko. Bank konvensional bisa menyalurkan dana atau tidak, mendapatkan pendapatan besar atau tidak deposan akan menerima bunga tetap yang diperjanjikan.

Besarnya penyaluran dana atau investasi yang dilakukan oleh bank syariah bukanlah suatu indikasi pendapatan bagi hasil besar yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun (deposan atau penabung), tetapi kualitas dari penyaluran dana atau investasi yang dilakukan oleh bank syariah itulah yang mempunyai pengaruh langsung hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun. Besarnya porsi pembagian pendapatan (*nisbah*) tidak menjamin besarnya bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik dana, karena bagi hasil tersebut sangat dipengaruhi oleh pendapatan yang akan dibagikan (pendapatan operasi utama sebagai unsur perhitungan distribusi hasil usaha), pendapatan yang akan dibagikan sangat tergantung pada pendapatan penyaluran dana yang benar-benar diterima (*cash basis*) oleh bank syariah sebagai *mudharib*, pendapatan ini tergantung pada kualitas aktiva produktif (penyaluran dana), kualitas aktiva produktif tergantung pada proses dan prinsip-prinsip penyaluran dana.

Fungsi ini dapat dilihat pada segi penghimpunan dana bank syariah dalam menghimpun dana, khususnya dana *mudharabah*, bertindak sebagai manager investasi dalam arti dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana

yang dihimpun tersebut harus dapat menghasilkan yang hasilnya akan dibagikan dengan pemilik dana. Bahkan, bank syariah tidak sepatutnya menghimpun dana *mudharabah* apabila tidak dapat menyalurkan dana tersebut pada hal yang produktif, karena hasil yang diperoleh akan tetap dan dibagikan kepada pemilik dana yang lebih banyak sehingga hal tersebut jelas akan merugikan pemilik dana yang sudah ada.

Pembayaran imbalan kepada pemilik dana yang dihimpun (*shahibul maal*) bank syariah tidak sama dengan pembayaran imbalan kepada pemilik dana bank konvensional (yang lazim disebut dengan deposan atau penabung). Bank konvensional memberikan imbalan kepada para deposannya dalam bentuk bunga dalam jumlah tetap dan ditentukan dimuka, tidak dipengaruhi oleh risiko atau masalah yang dihadapi oleh bank konvensional sedangkan imbalan pemilik dana (*shahibul maal*) bank syariah sangat tergantung pada pendapatan yang diperoleh oleh bank syariah sebagai *mudharib* dalam pengelolaan dana *mudharah*, bank syariah tidak diperkenankan memberikan imbalan dalam jumlah yang telah ditentukan di depan. Untuk memberikan gambaran perbedaan pemberian imbalan bank konvensional dengan bank syariah dapat ditunjukkan pada gambar skema disertai uraian sebagai berikut.



■ **Gambar 1** Imbalan pemilik dana bank syariah dan bank konvensional



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

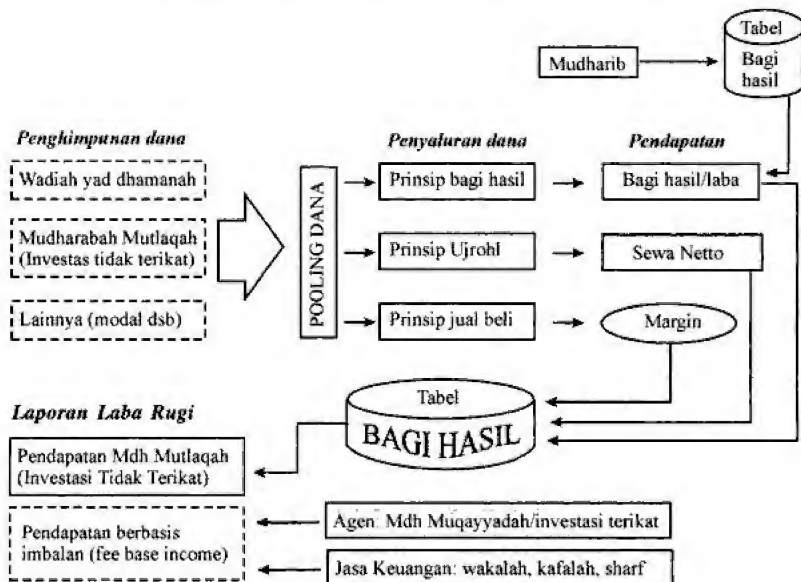


You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (*BPRS*), dan *Baitul Mal wat Tamwil* (*BMT*) adalah pada skalanya saja, misalnya bank umum syariah dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam jumlah yang besar-besar, *BPRS* pada jumlah yang sedang-sedang saja, serta *BMT* pada jumlah-jumlah yang kecil dan mikro, dimana jumlah-jumlah tersebut sangat tergantung pada besaran risiko yang ditanggung oleh Lembaga Keuangan Syariah tersebut. Secara umum alur operasional Lembaga Keuangan Syariah khususnya perbankan sebagaimana tercermin dalam gambar berikut.



Gambar 2 Alur operasional Bank Syariah

Dari gambar tersebut di atas dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Dalam penghimpunan dana bank syariah mempergunakan dua prinsip, yaitu
 - a) prinsip *wadiah yad dhamanah* yang diaplikasikan pada giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*, dan
 - b) prinsip *mudharabah mutlaqah* yang diaplikasikan pada produk deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah*.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

tidak diketahui dengan jelas sumber dananya dari prinsip penghimpunan dana yang mana dari prinsip *wadiah* atau dari prinsip *mudharabah* atau dari sumber dana modal sendiri.

3. Atas penyaluran dana tersebut akan diperoleh pendapatan yaitu dalam prinsip jual beli lazim disebut dengan *margin* atau keuntungan dan prinsip bagi hasil akan menghasilkan bagi hasil usaha serta dalam prinsip *ujroh* akan memperoleh upah (sewa). Pendapatan dari penyaluran dana ini disebut dengan pendapatan operasi utama yang merupakan pendapatan yang akan dibagi-hasilkan, pendapatan yang merupakan unsur perhitungan distribusi hasil usaha (*profit distribution*).

Walaupun, dalam akuntansi perbankan syariah diperkenankan mengakui pendapatan atas dasar akrual (*accrual basis*), namun sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 pendapatan yang dibagikan kepada pemilik dana didasarkan pada pendapatan yang benar-benar terjadi (*cash basis*).

Disamping itu, bank syariah memperoleh pendapatan operasi lainnya yang berasal dari pendapatan jasa perbankan yang merupakan pendapatan sepenuhnya milik bank syariah.

4. Dari pendapatan inilah yang akan dibagikan antara pemilik dana dan pengelola dana. Secara prinsip, pendapatan yang akan dibagikan antara pemilik dana dengan pengelola dana adalah pendapatan dari penyaluran dana yang sumber dananya berasal dari *mudharabah mutaqilah*.

Pada dasarnya, perhitungan distribusi hasil usaha hanya dilakukan oleh *mudharib* karena sesuai dengan prinsip *mudharabah* bahwa *mudharib* diberi kekuasaan penuh dalam mengelola dana tanpa adanya campur tangan *shaibul maal* (pemilik dana) sehingga yang mengetahui besaran hasil usaha tersebut adalah *mudharib*. Dalam *akad mudharabah* yang dilakukan antara nasabah (deposan) dengan bank syariah sebagai *mudharib* – penghimpunan dana yang dilakukan oleh



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

- b. Melakukan penyaluran dana meliputi sebagai berikut:
 - 1. prinsip jual beli berdasarkan akad, antara lain
 - a). *murabahah*;
 - b). *istishna*;
 - c). *salam*;
 - 2. prinsip bagi hasil berdasarkan akad, antara lain
 - a). *mudharabah*;
 - b). *musyarakah*;
 - 3. prinsip sewa menyewa berdasarkan akad, antara lain
 - a). *ijarah*;
 - b). *ijarah muntahiya bittamlik*;
 - 4. prinsip pinjam meminjam berdasarkan *akad qardh*.
- c. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan prinsip, antara lain
 - 1. *wakalah*;
 - 2. *hawalah*;
 - 3. *kafalah*;
 - 4. *rahn*.
- d. Membeli, menjual, dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah.
- e. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
- f. Menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
- g. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip syariah.
- h. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
- i. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadi'ah yad amanah*.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

- (2) Bank syariah dalam melaksanakan fungsi sosial dapat bertindak sebagai penerima dana sosial antara lain dalam bentuk *zakat, infaq, shadaqah, waqaf, hibah*, dan menyalurkannya sesuai syariah atas nama bank atau lembaga amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah.

3. Pasal 38

- (1) Bank wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia atas produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan.
- (2) Permohonan persetujuan atas produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilampiri dengan fatwa Dewan Syariah Nasional.

4. Pasal 39

- (1) Bank dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan secara konvensional.
- (2) Bank dilarang mengubah kegiatan usaha menjadi bank konvensional



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Jadi, bank syariah tidak pernah berbagi hasil dengan pemilik dana prinsip *wadiah* dan pemberian bonus atau imbalan kepada pemilik dana *wadiah* merupakan kebijakan bank syariah itu sendiri, sehingga dalam praktik bank syariah yang satu tidak sama dengan bank syariah yang lain. Ada bank syariah yang memberi bonus dan ada bank syariah yang tidak memberikan bonus.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dijelaskan karakteristik *wadiah* sebagai berikut.

1. *Wadiah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan. (PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 134).
2. *Wadiah* dibagi atas *wadiah yad-dhamanah* dan *wadiah yad-amanah*.
 - a. *Wadiah yad-dhamanah* adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan.
 - b. Prinsip *wadiah yad-amanah* adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. (PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 135).
3. Penerima titipan dalam transaksi *wadiah*, dapat berupa antara lain
 - (a) meminta *ujrah* (imbalan) atas penitipan barang/uang tersebut;
 - (b) memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatan barang/uang titipan (*wadiah yad-dhamanah*), namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya tergantung pada kebijakan penerima titipan. (PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 136).

Didalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) dijelaskan karakteristik *wadiah* (PAPSI, bagian IV.C – Simpanan, halaman IV.148), giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, dan bonus simpanan *wadiah* sebagai berikut.

1. Giro *wadiah* adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, *bilyet giro*, kartu *ATM*, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Termasuk di dalamnya giro *wadiah* yang diblokir untuk tujuan tertentu misalnya dalam rangka *escrow account*, giro yang diblokir oleh yang berwajib karena suatu perkara.
2. Tabungan *wadiah* adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan kuitansi, kartu *ATM*, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.
3. Atas bonus simpanan *wadiah* dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Wadi'ah terdiri dari dua jenis, yaitu *wadiah yad al amanah* dan *wadiah yad al dhamanah*.

1. *Wadiah yad al amanah* dengan karakteristik yaitu merupakan titipan murni dimana barang yang dititipkan tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh penitip, dan sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya, serta jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab sedangkan sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya titipan.
2. *Wadiah yad al dhamanah* dengan karakteristik yaitu merupakan pengembangan dari *wadi'ah yad al amanah* yang disesuaikan dengan aktifitas perekonomian. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Berikut ini akan dibahas aplikasi prinsip *wadiah* dimana dalam perbankan adalah untuk produk tabungan *wadiah* dan giro *wadiah*, sedangkan aplikasi prinsip *mudharabah* akan dibahas dalam butir berikutnya.

1. GIRO WADI'AH

Dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, Pasal 1 Ayat 6 disebutkan yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang giro *wadiah* (Himpunan Fatwa, Edisi kedua, hal 6-7) sebagai berikut:

- a. bersifat titipan;
- b. titipan bisa diambil kapan saja (*on call*);
- c. tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Karakteristik dari giro *wadiah*, antara lain sebagai berikut.

- a. Harus dikembalikan utuh seperti semula sejumlah barang yang ditiptkan sehingga tidak boleh *overdraft* (cerukan);
- b. Dapat dikenakan biaya titipan.
- c. Dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan barang titipan misalnya dengan cara menetapkan saldo minimum.
- d. Penarikan giro *wadi'ah* dilakukan dengan cek dan bilyet giro sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Jenis dan kelompok rekening sesuai ketentuan yang berlaku dalam kegiatan usaha bank sepanjang tidak bertentangan dengan syariah.
- f. Dana *wadi'ah* hanya dapat digunakan seijin penitip.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

4. instansi pemerintah;
5. perorangan yang tidak diwajibkan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak;
6. nasabah yang bekerja pada pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan selain sehubungan dengan pekerjaan;
7. nasabah yang memperoleh penghasilan dibawah *PTKP*;
8. badan keagamaan.

2. TABUNGAN *WADI'AH*

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.

Para ahli perbankan tempo dulu memberikan pengertian tabungan merupakan simpanan sementara, maksudnya simpanan untuk menunggu apakah untuk investasi (antara lain dalam bentuk deposito), untuk keperluan sehari-hari atau konsumsi yang dapat ditarik sewaktu-waktu dalam bentuk giro.

Namun, dengan dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yaitu SK Dir BI Nomor 22/63/Kep Dir tgl 01-12-1989 dan SE Nomor 22/133/UPG tgl 01-12-1989, dimana dalam ketentuan tersebut ditentukan syarat-syarat penyelenggaraan tabungan (IKPI), yaitu

- a. penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi bank atau *ATM*,
- b. penarikan tidak dapat dilakukan dengan cek, bilyat giro atau surat perintah pembayaran lain yang sejenis,
- c. bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam rupiah,
- d. ketentuan mengenai penyelenggaraan tabungan ditetapkan sendiri oleh masing-masing bank, dan
- e. bank penyelenggara tabungan diperkenankan untuk menetapkan sendiri, yakni



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



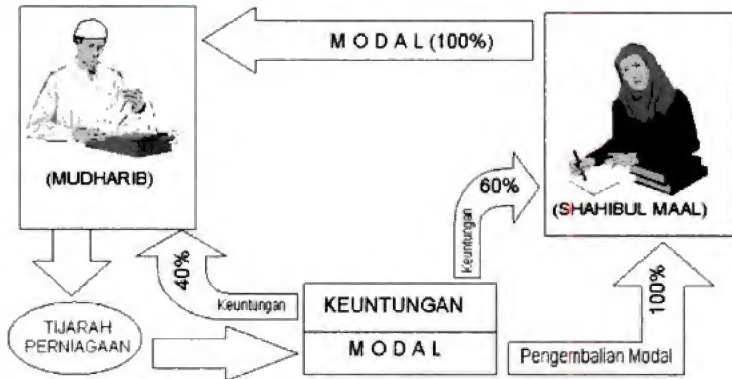
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Prinsip mudharabah dapat digambarkan sebagai berikut:

PRINSIP MUDHARABAH



• **Gambar 2.2** Prinsip Mudharabah

Dalam transaksi dengan prinsip *mudharabah* harus dipenuhi rukun *mudharabah* meliputi, yaitu

1. *shahibul maal/rabulmal* (pemilik dana/nasabah),
2. *mudharib* (pengelola dana/pengusaha/bank),
3. *amal* (usaha/pekerjaan), dan
4. *Ijab Qabul*.

Dilihat dari segi kuasa yang diberikan kepada pengusaha, *mudharabah* terbagi menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut.

1. *Mudharabah Muthlaqah* (investasi tidak terikat) yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan/gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan, dan pelanggan. Investasi tidak terikat ini pada usaha perbankan syariah diaplikasikan pada tabungan dan deposito.
2. *Mudharabah Muqaidah/Muqayyadah* (investasi terikat) yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) membatasi/memberi syarat

kepada mudharib dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya untuk melakukan mudharabah bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja. Bank dilarang mencampurkan rekening investasi terikat dengan dana bank atau dana rekening lainnya pada saat investasi. Bank dilarang untuk investasi dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau jaminan. Bank diharuskan melakukan investasu sendiri tidak melalui pihak ketiga. Jadi, dalam investasi terikat ini pada prinsipnya kedudukan bank sebagai agen saja dan atas kegiatannya tersebut bank menerima imbalan berupa *fee*.

Pola dalam investasi terikat dapat dilakukan dengan cara *chanelling* dan *executing*, yakni

- a. *chanelling*, apabila semua risiko ditanggung oleh pemilik dana dan bank sebagai agen tidak menanggung risiki apapun; dan
- b. *executing*, apabila bank sebagai agen juga menanggung risiko dan hal ini banyak yang menganggap bahwa investasi terikat *executing* ini sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip *mudharabah*, namun dalam Akuntansi Perbankan Syariah diakomodir karena dalam praktiknya pola ini dijalankan oleh bank syariah.

Penghimpunan dana yang terkait dengan perhitungan distribusi hasil usaha adalah penghimpunan dana yang mempergunakan prinsip *mudharabah* yang diaplikasikan oleh bank syariah dalam produk deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah*. Dalam penyaluran dana yang dilakukan bank syariah, salah satu prinsipnya adalah bagi hasil yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Lain halnya kedudukan bank syariah sebagai agen dalam dana mudharabah. Jadi, sebelum dilakukan pembahasan penghimpunan dana dengan prinsip *mudharabah* secara rinci, hendaknya harus diketahui terlebih dahulu kedudukan bank dalam *mudharabah*. Untuk itu, dapat dilihat pada gambar berikut ini.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

tersebut didasarkan pada data rata-rata harian. Saldo rata-rata harian dihitung dari penjumlahan saldo awal perhitungan sampai dengan akhir tutup buku dibagi dengan jumlah hari bagi hasil sehingga dari contoh tersebut pemilik dana sebesar Rp 30 milyar walaupun hanya dua hari mempunyai saldo rata-rata yang cukup besar. Oleh karena mempunyai saldo rata-rata maka jumlah tersebut ikut dalam perhitungan distribusi hasil usaha sehingga mendapat bagi hasil dan porsi hasil usaha tersebut sebenarnya adalah milik pemilik dan a yang lain (baca juga perhitungan saldo rata-rata tabungan).

6. Garansi dalam *mudharabah* untuk menunjukkan adanya tanggungjawab *mudharib* dalam mengembalikan modal kepada pemilik dana dalam semua pekerjaannya. Peraturan jaminan dalam *mudharabah*. Hal ini berarti, bahwa *mudharib* akan bertanggungjawab untuk mengembalikan modal kepada pemilik dana dalam hal apa pun, dan tidak diperbolehkan pada waktu jatuh tempo, kenyataan bahwa kepemilikan *mudharib* akan dana tersebut dibuat sebagai suatu *trust* dan dengan demikian tidak menjamin dana tersebut terkecuali dalam hal *omisi* atau pelanggaran. Dengan demikian Fuqaha mengizinkan pemilik dana untuk meminta jaminan dari *mudharib* terhadap pelanggaran atau penghilangannya yang disebut sebagai jaminan terhadap pelanggaran. Juga dimungkinkan bagi peraturan sesuai madzhab Maliki, bahwa pihak ketiga di luar *mudharabah* memberikan suatu jaminan. Hal ini telah diterapkan Jordania dengan menciptakan suatu dana agunan risiko dan Akademi Fiqih Islam dari Organisasi Konferensi Islam telah menyetujuinya, asalkan agunan tersebut dibuat bebas atau tanpa pertimbangan apapun.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, dijelaskan karakteristik



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

mudharabah. Apabila bank sebagai pengelola dana (*mudharib*) maka dana yang diterima adalah sebagai berikut.

- (a) Dalam *mudharabah muqayyadah* disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat sebagai investasi terikat dari nasabah.
- (b) Dalam *mudharabah muthlaqah* disajikan dalam neraca sebagai investasi tidak terikat.

(PSAK 59 – Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 11)

Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) dijelaskan karakteristik *mudharabah muthlaqah* atau investasi tidak terikat (PAPSI, Bagian V – investasi tidak terikat, halaman V.175-176) sebagai berikut.

1. *Mudharabah* terdiri dari dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat). Bab ini hanya membahas bank sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam penghimpunan dana pihak ketiga yang dikelompokkan dalam unsur investasi tidak terikat. Untuk *mudharabah muqayyadah* bank sebagai agen dibahas dalam bagian tersendiri sedangkan bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dibahas dalam pembiayaan *mudharabah*.
2. Investasi tidak terikat bukan merupakan kewajiban atau ekuitas bank, karena bank tidak berkewajiban mengembalikan dana tersebut apabila terjadi kerugian pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai *mudharib*.
3. Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah* sedangkan bagi pendapatan, dihitung dari total pendapatan pengelolaan *mudharabah*.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

syariah yang ditetapkan, atau tidak terjadi kelalaian di pihak bank syariah. Kontrak *mudharabah* dapat juga diadakan antara bank syariah sebagai pemberi modal atas namanya sendiri atau khusus atas nama deposan, pengusaha, para pengrajin lainnya termasuk petani, pedagang dan sebagainya. *Mudharabah* berbeda dengan spekulasi yang berunsur perjudian (*gambling*) dalam pembelian dan transaksi penjualan.

2.3.3. APLIKASI PRINSIP MUDHARABAH

Prinsip-prinsip *mudharabah mutalaqah* ini dapat diaplikasikan dalam kegiatan usaha perbankan untuk produk tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

1. TABUNGAN MUDHARABAH

Tabungan *mudharabah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu seperti dijelaskan dalam butir tabungan *wadiah*. Para ahli perbankan "tempo doeloe" memberikan pengertian tabungan merupakan simpanan sementara sebelum pemilik melakukan pilihannya apakah si pemilik akan melakukan konsumsi atau untuk kepentingan investasi. Hal ini dapat dilihat pada sekitar tahun 1971 terdapat produk tabungan yang diberi nama "Tabungan Pembangunan Nasional" (Tabanas) dimana penarikannya hanya diperkenankan dua kali dalam satu bulan. Tabungan dengan karakteristik seperti ini yang sesuai dengan prinsip *mudharabah* (tidak dapat ditarik setiap saat). Oleh karena tidak dapat ditarik setiap saat maka dalam tabungan yang mempergunakan prinsip *mudharabah* (tabungan *mudharabah*) tidak perlu diberikan ATM atau kartu yang sejenis itu. Dalam aplikasinya produk bank syariah tabungan yang mempergunakan prinsip ini antara lain, Tabungan Haji hanya dapat ditarik pada saat penabung akan menunaikan



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Obligasi syariah *mudharabah* merupakan surat berharga dan dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah dijelaskan hal-hal sehubungan surat berharga (efek) (PAPSI, hal III.30) adalah sebagai berikut.

1. Investasi pada efek hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh emiten yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Jenis kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah, antara lain
 - a. usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
 - b. usaha lembaga keuangan konvensional (*ribawi*) termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
 - c. usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram;
 - d. usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
3. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahibul maal*) dengan manajer investasi sebagai wakil pemilik harta (*shahibul maal*) maupun antara manajer investasi sebagai wakil pemilik harta (*shahibul maal*) dengan pengguna investasi.

Sedangkan PSAK lain yang mengatur efek-efek (surat berharga) sebagai dasar pencatatannya (PAPSI, hal III.28) obligasi syariah yang merupakan surat berharga, antara lain sebagai berikut.

1. PSAK 31 (Revisi 2000) tentang Akuntansi Perbankan Bank mengklasifikasikan efek pada saat perolehan ke dalam salah satu dari tiga kelompok berikut, yaitu



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

4. terjadi perubahan dalam peraturan pemerintah yang mengakibatkan bertambahnya bobot risiko atas investasi efek utang dalam perhitungan rasio tertentu misalnya dalam perhitungan *solvabilitas* perusahaan asuransi atau perhitungan rasio kecukupan modal perbankan.

Selain perubahan yang diuraikan tersebut di atas, kejadian lain yang tidak berulang dan bersifat luar biasa yang tidak dapat diantisipasi sehingga dapat menyebabkan perusahaan menjual atau mentransfer efek tertentu dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo tanpa harus dipertanyakan tujuan awal pemilikan efek dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo mempertimbangkan efek lain dalam kelompok yang sama. Semua penjualan dan transfer efek dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo harus diungkapkan sesuai dengan persyaratan pada paragraph 23. (*PSAK 50, paragraph 9*)

- c. Untuk efek individual dalam kelompok tersedia untuk dijual atau dimiliki hingga jatuh tempo, perusahaan harus menentukan apakah penurunan nilai wajar di bawah biaya perolehan (termasuk *amortisasi premi* dan *diskonto*) merupakan penurunan yang bersifat permanen atau tidak. Jika ada kemungkinan investor tidak dapat memperoleh kembali seluruh jumlah biaya perolehan yang seharusnya diterima sehubungan dengan persyaratan perjanjian efek utang maka penurunan yang bersifat permanen dianggap telah terjadi. Jika penurunan nilai wajar dinilai sebagai penurunan permanen, biaya perolehan efek individual harus diturunkan hingga sebesar nilai wajarnya, dan jumlah penurunan nilai tersebut harus diakui dalam laporan laba rugi sebagai rugi yang telah direalisasi maka biaya perolehan yang baru tidak boleh diubah kembali. Kenaikan selanjutnya



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Tujuan dari pemisahan ini adalah bahwa dalam penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah mengutamakan penyaluran utama yaitu penyaluran pada sektor riil yang dijalankan oleh bank syariah. Sumber dana yang dihimpun yang tidak dapat disalurkan pada penyaluran utama baru akan disalurkan pada penyaluran yang lainnya.

Dalam hal bank syariah menetapkan penyaluran utama dan penyaluran sekunder maka pendapatan yang merupakan unsur distribusi hasil usaha, pertama-tama dihitung dari pendapatan penyaluran utama dahulu, apabila terdapat dana yang dipergunakan untuk penyaluran lainnya, baru pendapatan penyaluran lainnya dihitung sebagai unsur distribusi hasil usaha sebesar porsi dana yang dipergunakan.

b. Total penyaluran dana

Dalam hal ini, bank syariah tidak menetapkan prioritas dalam penyaluran dananya, semua penyaluran dana yang diperkenankan oleh prinsip syariah dilakukan tanpa prioritas oleh bank syariah. Bank syariah juga tidak memotong atau mengurangi dana untuk *secondary reserve* misalnya untuk giro wajib minimum, semua penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah merupakan unsur dalam perhitungan distribusi hasil usaha. Oleh karena itu, semua pendapatan yang diperoleh dari penyaluran dana juga merupakan unsur distribusi hasil usaha. Berapa pendapatan yang dibagikan sangat tergantung dari jumlah sumber dana *mudharabah mutlaqah* yang dihimpun.

4. Penentuan pendapatan dibagihasilkan

Sesuai dengan paragraf 16 PSAK 59 tentang perbankan syariah dan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 14/DSN-MUI/LX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang sistem distribusi hasil usaha, pendapatan yang dibagikan antara *mudharib* dan *shahibul*

maal adalah pendapatan yang nyata-nyata telah diterima (*cash basis*) sedangkan pendapatan yang masih dalam pengakuan (*accrual basis*) tidak dibenarkan untuk dibagi antara *mudharib* dan *shahibul maal*. Dengan berlakunya PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dimana sebagai asumsi dasar adalah asumsi dasar akrual (*accrual basis*) maka bank syariah harus bisa membedakan pendapatan yang telah ada aliran kas masuk dan pendapatan yang masih dalam pengakuan.

Dalam Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Bank Syariah, paragraf 14 sampai dengan 16 dijelaskan asumsi dasar, khususnya yang dikaitkan dengan pengakuan pendapatan, sebagai berikut.

- a. Asumsi dasar konsep akuntansi bank syariah sama dengan asumsi dasar konsep akuntansi keuangan secara umum yaitu konsep kelangsungan usaha (*going concern*) dan dasar akrual. Pendapatan untuk tujuan penghitungan bagi hasil menggunakan dasar kas (*PSAK 59 – Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 14*).
- b. Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat terjadi (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas dimasa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (*PSAK 59 – Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 15*).

- c. Penghitungan pendapatan untuk tujuan bagi hasil menggunakan dasar kas (*PSAK 59 – Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 16*).

Perlu dijelaskan bahwa asumsi dasar akrual untuk pengakuan pendapatan hanya dipergunakan untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan bank syariah, tetapi untuk kepentingan perhitungan distribusi hasil usaha, pengakuan pendapatan yang akan dibagikan oleh bank syariah harus didasarkan pada asumsi dasar kas (*cash basis*). Oleh karena itu, bank syariah harus dapat memisahkan pendapatan yang dipergunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan dan pendapatan yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan distribusi hasil usaha.

Walaupun dalam PSAK tersebut jelas disebutkan bahwa pendapatan yang akan dibagikan adalah pendapatan yang mempergunakan asumsi dasar kas (*cash basis*) tetapi perlu kebijakan pengakuan pendapatan terhadap pendapatan-pendapatan yang insidentil, seperti pengakuan pendapatan atas penyaluran yang diterima untuk 3 bulan sekali, atau 6 bulan sekali dan sebagainya, juga perlu kebijakan terhadap pendapatan yang diterima dari penyaluran yang macet (sesuai ketentuan yang ada tidak dapat diakui sebagai pendapatan tetapi sebagai pengembalian pada PPAP), tetapi esensi yang ada bank syariah menerima pendapatan secara kas.

Dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, pada paragraf 162 dijelaskan kelompok pendapatan bank syariah adalah sebagai berikut.

A. Pendapatan Operasi Utama

(1). Pendapatan dari Jual beli

- (a) pendapatan *marjin murabahah*,
- (b) pendapatan bersih *salam paralel*, dan
- (c) pendapatan bersih *istishna paralel*.

(2). Pendapatan dari sewa

pendapatan bersih ijarah.

- (3). Penadapatan dari bagi hasil
 - (a) Pendapatan bagi hasil *mudharabah*, dan
 - (b) Pendapatan bagi hasil musyarakah.
 - (4). Pendapatan operasi utama lainnya.
- B. Pendapatan operasi lainnya
- Pendapatan administrasi penyaluran, pendapatan *fee* atas kegiatan bank yang berbasis imbalan, seperti *fee transfer*, *fee inkaso*, *fee kliring*, dan *fee mudharabah muqayyadah* bank bertindak sebagai agen.

Sedangkan dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) dijelaskan tentang pendapatan operasi utama (PAPSI, Bagian VII.C.2 – Pendapatan Operasi Utama, halaman VII.197-200) sebagai berikut.

Pendapatan operasi utama terdiri dari pendapatan dari transaksi jual beli, pendapatan dari sewa, pendapatan bagi hasil, dan pendapatan operasi utama lainnya.

1. Pendapatan dari jual beli
 - a). Pendapatan margin *murabahah* adalah sebagai berikut.
 - 1). Pendapatan margin *murabahah* merupakan pendapatan margin yang di tangguhkan yang telah dapat diakui karena telah jatuh tempo atau telah dilunasi piutang *murabahahnya*.
 - 2). Jika pelunasan piutang *murabahah* dilakukan dengan mengangsur maka pendapatan margin *murabahah* diakui pada saat angsuran tersebut jatuh tempo.
 - 3). Jika dalam transaksi *murabahah* sebagian dana untuk membeli berasal dari nasabah pembeli maka perlakuan akuntansi terhadap sebagian dana tersebut mengikuti perlakuan akuntansi *urbun* (uang muka).
 - 4). Besarnya margin *murabahah* merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli dan dapat dihitung, antara



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

- d) Dalam hal terjadi kerugian dari pembiayaan maka disajikan sebagai kerugian bersih pembiayaan dalam laporan laba rugi.
4. Pendapatan operasi utama lainnya
- Pendapatan operasi utama lainnya, antara lain berasal dari
- a). pendapatan dari pinjaman *qard*,
 - b). pendapatan dari penempatan dana pada Bank Indonesia misalnya sertifikat *wadiah* Bank Indonesia,
 - c). pendapatan penempatan dana pada bank syariah lainnya, misalnya Sertifikat Investasi *mudharabah* Antarbank, dan
 - d). pendapatan dari surat berharga syariah.

Sesuai dengan asumsi dasar dalam akuntansi perbankan syariah adalah akrual basis, sehingga dalam pendapatan operasi utama tersebut terkandung pendapatan yang nyata diterima (*cash basis*) dan terkandung juga pendapatan yang masih dalam pengakuan (*accrual basis*). Pendapatan operasi utama merupakan pendapatan sebagai unsur dalam perhitungan distribusi hasil usaha (profit distribution) namun, sesuai yang harus diperhatikan adalah pendapatan yang dibagikan kepada pemilik dana (diperhitungkan dalam pembagian hasil usaha) adalah pendapatan yang nyata diterima (*cash basis*) sedangkan pendapatan yang masih dalam pengakuan (*accrual basis*) tidak diperkenankan dibagikan kepada pemilik dana (tidak diperkenankan dimasukkan dalam perhitungan distribusi hasil usaha).

Bank syariah harus dapat membedakan pendapatan yang benar-benar diterima (*cash basis*) yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan distribusi hasil usaha, dan pendapatan yang masih dalam pengakuan saja (*accrual basis*) yang dipergunakan untuk kepentingan pembuatan laporan keuangan bank syariah. Peranan dan fungsi pendapatan *cash basis* dan *accrual basis* dapat digambarkan sebagai berikut.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

terikat) yang dihimpun tanpa adanya pengurangan beban-beban yang dikeluarkan oleh bank syariah.

2. Hak pihak ketiga atas bagi hasil investai tidak terikat (angka 2)

Merupakan porsi bagi hasil dari hasil usaha (pendapatan) yang diserahkan oleh bank syariah kepada pemilik dana *mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat). Penentuan besarnya bagi hasil dari hasil usaha (pendapatan) yang diserahkan kepada pemilik dana investasi tidak terikat tersebut dilakukan dalam perhitungan distribusi hasil usaha yang sering disebut dengan *profit distribution*. Akuntansi Perbankan syariah dijelaskan bahwa porsi bagi hasil dari hasil usaha (pendapatan) yang diserahkan pemilik dana investasi tidak terikat bukan sebagai beban bank syariah, karena besarnya bagi hasil yang diberikan sangat tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diterima oleh bank syariah.

3. Pendapatan operasi lainnya (angka 3)

Pada praktiknya dalam penyaluran dana bank syariah mengenakan *fee* administrasi atas penyaluran tersebut yang besarnya disepakati antara bank sebagai pemilik dana dan debitur sebagai pengelola dana (*mudharib*). Oleh bank syariah pendapatan *fee* administrasi tersebut menjadi milik bank sendiri karena pendapatan tersebut merupakan upah administrasi yang dilakukan oleh bank syariah sehingga pendapatan tersebut bukan sebagai unsur distribusi hasil usaha.

Pendapatan operasi lain yang diperoleh oleh bank syariah adalah pendapatan atas kegiatan usaha bank syariah dalam memberikan layanan jasa keuangan dan kegiatan lain yang berbasis imbalan seperti pendapatan *fee inkaso*, *fee transfer*, *fee LC* dan *fee* kegiatan yang berbasis imbalan lainnya. Pendapatan tersebut sepenuhnya menjadi milik bank syariah sehingga bukan sebagai unsur pendapatan pada distribusi hasil usaha (distribusi hasil usaha).



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Bab 4

AKUNTANSI PENGHIMPUNAN DANA DAN BAGI HASIL

4.1. PENDAHULUAN

Dalam penghimpunan dana bank syariah yang harus diperhatikan adalah prinsip yang dipergunakan dalam penghimpunan dana tersebut, yaitu dengan mempergunakan prinsip *wadiah* (*wadiah dhamanah*) dan prinsip *mudharabah* (*mudharabah mutlaqah* atau Investasi Tidak Terikat)

Dalam penghimpunan dana yang mempergunakan prinsip *mudharabah* maka kedudukan bank sebagai *mudharib* yang akuntansinya dibahas dalam bab ini sedangkan penyaluran dana dengan *mudharabah* dimana bank sebagai *shaibul maal* akuntansinya dibahas dalam bab akuntansi pembiayaan *mudharabah*.

4.2. STANDAR AKUNTANSI

Dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Bank Syariah, dijelaskan acuan akuntansi tentang pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*, bank sebagai pengelola dana atau *mudharib* dana sebagai berikut.

4.2.1. Pengakuan dan Pengukuran

1. Dana investasi tidak terikat diakui sebagai investasi tidak terikat pada saat terjadinya sebesar jumlah yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, investasi tidak terikat diukur sebesar nilai tercatat (PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 29).

2. Bagi hasil investasi tidak terikat dialokasikan kepada bank dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati (PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 30).
3. Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*) seperti pada paragraf 25 (PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 31).
4. Kerugian karena kesalahan atau kelalaian bank dibebankan kepada bank (*mudharib*), (PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 32).

4.2.2. Penyajian

1. Pembiayaan *mudharabah mutlaqah* yang diterima bank syariah disajikan dalam neraca pada unsur investasi tidak terikat di antara unsur kewajiban dan ekuitas (PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 157)
2. Investasi tidak terikat adalah dana yang diterima oleh bank dengan kriteria sebagai berikut.
 - (a) bank mempunyai hak untuk menggunakan dan menginvestasikan dana, termasuk hak untuk mencampur dana yang dimaksud dengan dana lainnya;
 - (b) keuntungan atau kerugian dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati;
 - (c) bank tidak memiliki kewajiban secara mutlak untuk mengembalikan dana tersebut jika mengalami kerugian, (PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 158).

4.2.3. Pengungkapan

1. Laporan keuangan bank syariah mengungkapkan jumlah saldo dana investasi tidak terikat berdasarkan segmen geografis dan periode jatuh temponya. Selain itu, juga mengungkapkan metode alokasi keuntungan (kerugian) investasi antara pemilik dana

investasi tidak terikat dan bank, baik bank sebagai *mudharib*. Pengungkapan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut.

- (a) metode yang digunakan bank untuk menentukan bagian keuntungan atau kerugian dari dana tidak terikat dalam periode yang bersangkutan;
- (b) tingkat pengembalian;
- (c) nisbah keuntungan yang disepakati dari masing-masing dana investasi.

(PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 186)

2. Bank syariah mengungkapkan kisaran prosentase bagi hasil dari masing-masing jenis dana investasi tidak terikat dan simpanan lainnya. (PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 195)
3. Sejauh bisa dilaksanakan, hal-hal tersebut di bawah ini yang berasal dari investasi yang dibiayai bersama oleh bank dan para pemilik dana investasi tidak terikat dan investasi yang hanya dibiayai oleh bank harus diungkapkan secara terpisah, misalnya
 - (a) pendapatan dan keuntungan investasi;
 - (b) beban dan kerugian investasi;
 - (c) laba (rugi) investasi;
 - (d) bagian para pemilik dana investasi tidak terikat pada pendapatan (kerugian) dari investasi sebelum bagian *mudharib*;
 - (e) bagian bank pada pendapatan (kerugian) investasi;
 - (f) bagian bank pada pendapatan dana investasi tidak terikat sebagai *mudharib*,

(PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 197).

4.3. PERLAKUKAN AKUNTANSI DAN CONTOH KASUS

Semua penghimpunan dana bank syariah yang mempergunakan prinsip *mudharabah mutlaqah*, seperti tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* dibukukan pada unsur neraca “Investasi Tidak terikat”.

Unsur Investasi Tidak Terikat ini, tidak dapat dikategorikan sebagai kewajiban dan tidak pula dapat dikategorikan sebagai *ekuitas*, karena sesuai prinsip syariah *mudharabah*, apabila terdapat kerugian yang bukan karena kelalaian *mudharib* maka kerugian tersebut menjadi tanggungan pemilik dana/*shahibul maal*. Oleh karena itu, dana *mudharabah* tersebut tidak harus dikembalikan oleh *mudharib* seluruhnya (seratus persen) namun, dikembalikan setelah dikurangi dengan kerugian yang ditanggung oleh pengelola dana *mudharabah* tersebut. Hal ini, sangat berbeda dengan penghimpunan dana dengan prinsip *wadiah* (titipan), dimana penerima titip harus mengembalikan dana tersebut kapan saja penitip menghendaki sehingga prinsip ini dikategorikan sebagai kewajiban, tidak dikategorikan dalam kelompok *ekuitas*, karena *ekuitas* adalah penyertaan modal dari pemegang saham.

4.3.1. AKUNTANSI PENGHIMPUNAN DANA WADIAH

Contoh 1

Pada tanggal 01 Agustus 2001 Diterima setoran tunai pembukaan giro *wadiah* atas nama Qohar sebesar Rp 20.000.000,-
Atas transaksi tersebut bank syariah melakukan jurnal sebagai berikut.

01/08/2001	Dr. Kas	20.000.000	
	Cr. Giro Wadiah (rekening giro Qohar)		20.000.000

Dari jurnal di atas akan mengakibatkan perubahan Buku Besar dan posisi Neraca sebagai berikut.

BUKU BESAR Giro Wadiah

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
			01/08	Rekening Qohar	20.000.000

NERACA
Per tanggal 1 Agustus 2001

Aktiva

pasiva

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
		Kewajiban Giro Wadiah	20.000.000

Perubahan Saldo Buku Besar Giro *wadiah* sebagai akibat dari penambahan saldo rekening individu atas nama Qahar, yang dapat digambarkan dalam perkiraan sebagai berikut.

Rekening Giro Qohar

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
01/08	Setoran awal		20.000.000	20.000.000

Contoh 2

Pada tanggal 05 Agustus 2001 Qohar melakukan penarikan giro *wadiahnya* melalui *ATM* sebesar Rp 2.000.000,-

Atas transaksi tersebut jurnal yang dilakukan adalah

05/08/2001	Dr. Giro wadiah (Rek giro Qohar)	2.000.000	
	Cr. Kas ATM		2.000.000

Atas transaksi tersebut akan mengakibatkan perubahan Buku Besar dan posisi Neraca sebagai berikut.

BUKUBESAR
Giro Wadiah

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
05/08	Rekening Qohar Saldo	2.000.000 18.000.000	01/08	Rekening Qohar	20.000.000

NERACA
Per tanggal 05 Agustus 2001

Aktiva

pasiva

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
		Kewajiban Giro Wadiah	18.000.000

Perubahan Saldo Buku Besar Giro *wadiah* sebagai akibat dari penambahan saldo rekening individu atas nama Qohar, yang dapat digambarkan dalam perkiraan sebagai berikut.

Rekening Giro Qohar

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
01/08	Setoran awal		20.000.000	20.000.000
05/08	Penarikan ATM	2.000.000		18.000.000

Contoh 3

1. Pada tanggal 07 Agustus 2001 Qohar menyerahkan aplikasi transfer untuk dilakukan pemindahbukuan dari rekening gironya sebesar Rp5.000.000,—untuk dibuatkan deposito *mudharabah* dengan nisbah 65:35.
2. Pada tanggal 07 Agustus 2001 Yusuf melakukan penyetoran tunai sebesar Rp 1.000.000,— sebagai setoran pertama giro *wadiah*.

Atas transaksi tersebut oleh bank syariah dilakukan jurnal sebagai berikut.

07/08/2001	Dr. Giro Wadiah (Rek giro Qohar) Cr. Deposito <i>Mudharabah</i> (a/n Qohar)	5.000.000	5.000.000
07/08/2001	Dr. Kas Cr. Giro Wadiah (Rek giro Yusuf)	1.000.000	1.000.000

Dari transaksi tersebut akan mengakibatkan perubahan pada Buku Besar dan Posisi Neraca sebagai berikut.

BUKUBESAR

Giro Wadiah

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
05/08	Rekening Qohar	2.000.000	01/08	Rekening Qohar	20.000.000
07/08	Rekening Qohar	5.000.000	07/08	Rekening Yusuf	1.000.000
	Saldo	14.000.000			
		21.000.000			21.000.000

NERACA

Per tanggal 07 Agustus 2001

Aktiva

pasiva

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
		Kewajiban Giro Wadiah	14.000.000

Perubahan Saldo Buku Besar Giro wadiah sebagai akibat dari penambahan saldo rekening individu atas nama Qahar dan atas nama Yusuf, yang dapat digambarkan dalam perkiraan sebagai berikut.

Rekening Giro Qohar

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
01/08	Setoran awal		20.000.000	20.000.000
05/08	Penarikan ATM	2.000.000		18.000.000
07/08	Deposito	5.000.000		13.000.000

Rekening Giro Yusuf

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
01/08	Setoran awal		1.000.000	1.000.000

Contoh 6

Bank syariah menerapkan kebijakan untuk memberikan bonus kepada pemegang rekening giro wadiah. Untuk hal tersebut Tuan Qohar memberikan bonus sebesar Rp.10.000,- dan atas bonus tersebut dipotong pajak sebesar 15%.

Atas pemberian bonus kepada Tuan Qohar bank syariah melakukan jurnal sebagai berikut.

Dr.	Beban bonus <i>wadiah</i>	Rp 10.000,-	
Cr.	Giro wadiah (rekening Qohar)		Rp 8.500,—
Cr.	Titipan Kas Negara (pajak)		Rp 1.500,—

4.3.2. AKUNTANSI DEPOSITO MUDHARABAH

Contoh 1

Pada tanggal 1 Agustus 2001 bank syariah menerima setoran tunai atas nama Maskaryo sebesar Rp 25.000.000,- sebagai investasi deposito *mudharabah* untuk jangka waktu satu bulan dengan nisabah 65 untuk nasabah dan 35 untuk bank syariah.

Atas transaksi tersebut bank syariah melakukan jurnal sebagai berikut.

02/08/2001	Dr. Kas	25.000.000	
	Cr. Deposito Mudharabah (a/n Maskaryo)		25.000.000

Dari transaksi tersebut akan mempengaruhi perubahan Buku Besar dan posisi Neraca sebagai berikut.

BUKU BESAR Deposito Mudharabah

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Saldo	25.000.000	01/08	Maskaryo	25.000.000
		25.000.000			25.000.000

NERACA
Per tanggal 01 Agustus 2001

Aktiva

pasiva

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
		Kewajiban	
		Giro Wadiah	00
		Investasi Tidak Terikat	
		Deposito Mudharaba	25.000.000

Contoh 2

Pada tanggal 02 Agustus 2001 bank syariah menerima setoran tunai pembukaan deposito *mudharabah* atas nama Qoimun sebesar Rp 5.000.000 dng nisbah 65: 35

Atas transaksi tersebut bank syariah melakukan jurnal sebagai berikut:

02/08/2001	Dr. Kas	5.000.000	
	Cr. Deposito Mudharabah (a/n Qoimun)		5.000.000

Dari transaksi tersebut akan mempengaruhi perubahan Buku Besar dan posisi Neraca sebagai berikut.

BUKUBESAR
Deposito Mudharabah

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
			01/08	Maskaryo	25.000.000
			02/08	Qoimun	5.000.000
	Saldo	30.000.000			
		30.000.000			30.000.000

BUKU BESAR
Deposito Mudharabah

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
20/08	Maskaryo	25.000.000	01/08	Maskaryo	25.000.000
			02/08	Qoimun	5.000.000
			04/08	Masdul	15.000.000
	Saldo	20.000.000			
		45.000.000			45.000.000

NERACA
Per tanggal 02 Agustus 2001

Aktiva

pasiva

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
		Kewajiban	
		Giro Wadiah	00
		<i>Investasi Tidak Terikat</i>	
		Deposito Mudharaba	20.000.000

Contoh 5

Pada tanggal 30 Agustus 2001, berdasarkan perhitungan distribusi pendapatan beban bagi hasil yang akan dibayar untuk sekelompok deposito *mudharabah* sebesar Rp 35.000.000,—

Atas pencadangan bagi hasil tersebut dilakukan jurnal sebagai berikut.

30/08/2001	Dr. Hak pihak ketiga atas Bagi Hasil Investasi Tdk Terikat – Deposito	35.000.000	
	Cr. Keuntungan Sdh diumumkan belum dibagi – deposito		35.000.000

Dari jurnal di atas akan mengakibatkan perubahan saldo Buku Besar dan posisi Neraca, serta rekening individu sebagai berikut.

BUKUBESAR
Tabungan Mudharabah

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
06/08	Rekening Zaenab Saldo	1.000.000	01/08	Rekening Zaenah	10.000.000
		9.000.000			
		10.000.000			10.000.000

NERACA
Per tanggal 06 Agustus 2001

Aktiva

pasiva

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
		Kewajiban	
		Giro Wadiah	00
		Investasi Tidak Terikat	
		Deposito Mudharaba	00
		Tabungan Mudharaba	9.000.000

Rekening Tabungan Zaenab

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
03/08	Setoran awal		10.000.000	10.000.000
06/08	Penarikan		1.000.000	9.000.000

Contoh 3

Pada tanggal 30 Agustus 2001, berdasarkan perhitungan distribusi pendapatan bagi Hasil yang akan dibayar untuk sekelompok tabungan *mudharabah* sebesar Rp 50.000.000,-

Atas pencadangan bagi hasil tersebut dilakukan jurnal sebagai berikut.

30/08/2001	Dr. Hak pihak ketiga atas Bagi Hasil Investasi Tdk Terikat – Tabungan	50.000.000	
	Cr. Keuntungan Sdh diumumkan belum dibagi – Tabungan		50.000.000

Contoh 4

Pada tanggal 1 September 2001 dibayarkan bagi hasil tabungan *mudharabah* untuk Zaenab sebesar Rp 20.000,- dan atas pembayaran bagi hasil tersebut dipotong pajak 15%. Bank syariah telah mencadangkan pembagian hasil usaha kepada nasabah.

Atas pembayaran bagi hasil tabungan *mudharabah* Zaenab tersebut, bank syariah melakukan jurnal sebagai berikut.

04/09/2001	Dr. Keuntungan Sdh diumumkan belum dibagi – tabungan mudharabah	20.000	
	Cr. Kas		17.000
	Cr. Titipan kas negara		3.000

Contoh 5

Pada tanggal 25 Agustus 2001 dilakukan penyetoran pajak ke kas negara atas bagi hasil yang dipungut oleh bank syariah sebesar Rp 45.000,—

Atas penyetoran pajak tersebut bank syariah dilakukan jurnal sebagai berikut:

25/08/2001	Dr. Titipan PPh 21 Cr. Bank Indonesia (Kas Negara)	45.000	45.000
------------	---	--------	--------

4.3.3. AKUNTANSI SURAT BERHARGA

1. Pada saat membeli efek/surat berharga:

Db. Efek/surat berharga	xxxxx	
Kr. Kas/rekening.../kliring		xxxxx

2. Pada saat pengakuan bagi hasil

Db. Pendapatan bagi hasil efek/surat berharga yang akan diterima	xxxxx	
Kr. Pendapatan bagi hasil efek/surat berharga		xxxxx

3. Pada saat penerimaan bagi hasil

Db. Kas/rekening.../kliring	xxxxx	
Kr. Pendapatan bagi hasil efek/surat berharga yang akan diterima.		xxxxx

4. Pada saat menjual/jatuh tempo

Db. Kas/rekening.../kliring	xxxxx	
Kr. Efek/surat berharga		xxxxx

Lampiran

TITIPAN IDA'

Terjemahan

Al Fiqh Islam wa Adillatahu, Dr Wahbah Zuhaili

oleh DR. Setyawan Budi Utomo

A. Sistematika pembahasan judul

Pada akad *ida'* kita akan membicarakan lima pembahasan, yakni

1. definisi *ida'* dan dalil pensyariatannya;
2. rukun *ida'* dan syarat-syaratnya;
3. hukum akad *ida'* dan cara pemeliharaan barang titipan;
4. perihal *wadi'ah*, apakah kuasa *wadi'ah* (yang menerima titipan) adalah amanah atau jaminan;
5. perihal jaminan *wadi'ah*.

1. Definisi *Ida'* dan dalil pensyariatannya

Menurut bahasa *wad'u* berarti meninggalkan dan *wadi'ah* menurut bahasa adalah sesuatu yang diletakkan pada yang bukan pemiliknya untuk dijaga. Dan menurut *syara'*, ia dipakai untuk akad *ida'* (titipan) dan juga untuk barang yang ditiptkan. Yang *rajih* adalah akad, hanya saja lebih shahih kalau dikatakan *ida'* adalah akad bukan *wadi'ah* yang akad, karena yang *rajih* adalah akad. Definisi *ida'* menurut ulama Hanafiyah adalah penguasaan orang lain untuk menjaga hartanya, baik secara *sharih* (jelas) atau *dilalah* (tersirat).¹ seperti perkataan *mudi'* (orang yang menitipkan) kepada seseorang "saya titipkan",² dan orang itu menerima maka sempurna lah *ida'* secara jelas. Atau seseorang datang dengan

¹ Takmilah Fathul Qadir:7/88, Hasyiah Ibnu Abidin:4/515, Majma' adh-dhomanat:68

² dipakai untuk "sya jadikan dia titipan padamu, dankamu terima sebagai barang titipan

membawa sebuah pakaian kepada seseorang lalu ia berkata "ini titipan kepadamu", dan orang itu diam maka ketika itu, sahlah *wadi'ah* secara tersirat.

Syafi'i dan Maliki mendefinisikan bahwa perwakilan dalam memelihara (menjaga) barang milik sesuatu yang diharamkan, tetapi dikhususkan³ maka sah menitipkan khamar *al-muhtaromah* (khamar yang dimiliki oleh seseorang kemudian, ia masuk Islam dan khamar itu masih ada, atau warisan dari pewarisnya) kulit bangkai hewan yang sudah disamak dan anjing yang sudah dilatih untuk berburu.

Sedangkan yang bukan khusus seperti anjing yang tidak dipelihara dan baju yang diterbangkan angin, ini tidak ada pengkhususannya, karena merupakan harta yang hilang yang berbeda dengan hukum *wadi'ah*.

Orang yang meletakkan *wadi'ah* itu dinamakan *mudi'* dan penerimanya disebut *muda'* atau *wadi'*.

Ida' disyariatkan oleh agama dan dianjurkan dalam firman Allah, "sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada ahlinya". (QS. Annisa:58) juga al-Baqoroh:287.

Serta sabda Rasul, "tunaikan amanah kepada orang yang memberi amanah, dan janganlah mengkhianati orang yang mengkhianatimu". (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, ia mengatakan hadits Hasan). Dikeluarkan juga oleh Hakim dan dishahihkannya dan dimunkarkan oleh Abu Hatim ar-Razi. Dikeluarkan juga oleh sekelompok hafidz diriwayatkan oleh Baihaqi, Malik dan Daruqutni, Ahmad dan Abu Na'im. Lihat al-Talkhis al-Habir:270, Nailul Authar:5/297, Subulus Salam:3/68).

Para ulama sepanjang zaman telah sepakat tentang pembolehan penitipan dan minta penitipan, karena kebutuhan manusia kepada hal ini.⁴

³ mughnil Muhtaj:3/74, Qalyubi wa Umairah:3/180, Syarh al-Tahrir:167, Nihayatul Muhtaj:5/87, Hasyiah as-syarqani:2/96, Hasyiah ad-Dasuqi:3/419

⁴ ibid., al-Mughni:6/382, al-Mabsuth:11/109

2. Rukun *Ida'* dan syarat-syaratnya

a. Rukun *ida'*

Menurut Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul* yaitu seseorang berkata kepada yang lain, "saya menitipkan ini kepadamu", atau jagalah ini untukku atau "ambillah ini sebagai titipan padamu", atau yang semisalnya dan orang kedua menerimanya.⁵

Sedangkan rukunnya menurut Jumhur ada empat, yakni⁶

- (1) dua orang pelaku akad (*mudi'* dan *wadi'*);
- (2) *wadi'ah* (barang yang dititipkan);
- (3) *sighat* (*ijab* dan *qabul*);
- (4) *qabul* bisa dengan *lafadz* misalnya saya terima, atau tersirat saja. Misalnya ada seseorang yang menitipkan hartanya kepada orang lain dan orang itu diam saja maka diamnya ini, sama dengan persetujuannya, sama seperti saling memberikan pada jual beli.

b. Syarat-syarat

Hanafiyah mensyaratkan pada dua pelaku akad yaitu berakal maka tidak sah penitipan kepada anak kecil, orang gila, dan begitu juga *qabul* mereka. Dan tidak disyaratkan harus *baligh* karena sahnya penitipan kepada anak kecil yang boleh melakukan perdagangan karena itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh pedagang. Begitu juga sahnya *qabul* dari anak kecil yang sudah diizinkan (melakukan transaksi), karena ia bisa menjaga sedangkan anak kecil yang masih ditahan, kemudian melakukan transaksi maka *qabulnya* tidak sah, karena biasanya dia tidak bisa menjaga harta.⁷

⁵ al-bada':6/207, Majma' adh-dhomanat:68

⁶ al-Syarhul Kabir:3/419, Mughniil Muhtaj:3/80, Kasysyaful Qana':4/186, Ghoyatul Muntaha:2/269, syafi'iyah mengatakan yang shahih tidak disyaratkan qabul dengan lafadz, cukup dengan memegang (menerima) *wadi'ah*, seperti pada wakalah, baik bisa pindah atau tidak.

⁷ al-BAda':op.cit.,

Jumhur mensyaratkan pada *ida'* apa yang disyaratkan pada *wakalah* (perwakilan) yaitu *baligh*, berakal, dan *rusyd*.

Pada *wadi'ah* disyaratkan harta itu bisa dikuasai, kalau ia menitipkan budak yang kabur atau burung di udara atau harta yang jatuh ke laut maka ini tidak dijamin.⁸

3. Hukum Akad *Ida'* dan Jalan Pemeliharaan *Wadi'ah*

Rukun akad *ida'* yaitu wajib menjadi bagi pemilik, karena *ida'* dari segi pemilik adalah permintaan untuk dijaga dan sebagai amanah sedangkan dari segi *wadi'* adalah wajib baginya untuk menjaga harta itu. Ini berdasarkan hadits yaitu *المسلمون عند شروطهم*. Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Amr bin Auf. Lihat Nashbur royah:4/112, Subulus Salam:3/59.

a. Titipan dua orang pada satu orang

Kalau ada dua orang menitipkan sebuah titipan, lalu keduanya pergi, lalu hadir salah seorang dari keduanya dan menuntut bagiannya maka *wadi'* tidak boleh memberikan bagiannya sampai yang seorang lagi datang. Dua sahabat Abu Hanifah berkata bahwa *wadi'* boleh membagi *wadi'ah* dan memberikan bagian orang yang datang, dan itu bukan bagian bagi yang tidak ada, bahkan kalau bagian yang tinggal pada *wadi'* rusak maka yang tidak hadir harus bergabung dengan yang sudah mengambil apa yang bisa diambil. Dalilnya adalah bahwasanya salah seorang dari kedua *mudi'* itu minta kepada *wadi'* untuk memberikan bagiannya maka ia diperintahkan untuk memberikannya sebagai mana pada utang milik bersama.

Dalil Abu Hanifah bahwa kita tidak terima apabila salah seorang dari kedua *mudi'* itu menuntut untuk menyerahkan bagiannya tetapi menyerahkan bagian orang yang tidak ada,

⁸ Hasyiah Ibnu Abidin, 4/516

jaminan. *Wadi'* tidak wajib menjamin, kecuali kalau ia melakukan perbuatan yang melanggar batas kewajaran atau ada kelalaian, seperti sabda Rasul, "Penerima *wadi'ah* yang tidak khianat tidak menjamin (barang *wadi'ah* itu)". (Dikeluarkan oleh Daruqutni dan Baihaqi. lihat Nasb ar-Royah:4/115, al-Talkhis al-Habir:270, Nailul Author:5/296). Juga, dalam sabdanya, "Orang yang amanah tidak menjamin". (HR. Daruqutni dari Amir bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dan pada *isnad*nya ada yang *dhaif*, Nailul author:5/296). Dan persyaratan jaminan atas orang amanah adalah *bathil*, ini juga fatwa menurut Hanafiyah.

Dari fatwa tersebut muncul kewajiban baginya untuk mengembalikan *wadi'ah* kepada pemilik kalau diminta sesuai dengan firman Allah QS. an-Nisa:58.

Kalau pemilik menuntut *wadi'* dan ia (*wadi'*) berkata "kamu tidak menitipkan apapun pada saya" lalu, ia berkata hilang maka ia harus menjamin, karena ia telah keluar dari batas amanah. Jika ia berkata, kamu tidak berhak dariku apapun, kemudian ia berkata "hilang" maka yang benar adalah perkataannya beserta sumpah maka dari situ muncul kewajiban melaksanakan *wadi'ah* kepada pemilik yang sama, karena Allah telah menyuruh untuk menunaikan amanah orang yang berhak dengannya, kalau ia mengembalikan ke rumah pemilik bukan ke hadapannya atau ia memberikan kepada keluarganya maka ia harus menjamin. Karena, ia tidak redha dengan tangan keluarganya sebab ia telah menitipkannya pada orang lain.

Ini berbeda dengan *'ariyah* (pinjaman) dan *ijaroh* (sewa menyewa). Kalau ia mengembalikan barang pinjaman atau barang yang disewa ke rumah pemiliknya atau kepada keluarganya maka ia tidak menjamin, karena itu sudah biasa berlaku dalam masalah pengembalian barang pinjaman sehingga walaupun pada pinjaman barang yang mewah seperti akad pada mutiara maka ia menjamin karena adatnya demikian.

Dari situ timbul bahwa perkataan yang benar adalah perkataan *wadi'* dalam masalah rusaknya dan pengembalian secara mutlak beserta sumpah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.¹⁴

- a. Kalau terjadi perbedaan pendapat *mudi'* dan *wadi'*, *wadi'* mengatakan bahwa *wadi'ah* telah rusak atau "sudah saya kembalikan padamu" dan *mudi'* mengingkarinya dan mengatakan "tidak, tapi kamu telah merusaknya" maka perkataan yang benar adalah perkataan *wadi'*, karena ia dipercaya dalam menjaga, tetapi harus beserta sumpah, sebagaimana kita terangkan.
 - b. Kalau *mudi'* mendatangkan bukti atas kerusakan maka *wadi'* harus menjamin, begitu juga kalau ia minta *wadi'* untuk bersumpah maka *wadi'* menarik diri karena takut. Kalau *mudi'* punya bukti bahwa *wadi'* merusaknya, sedangkan *wadi'* juga punya bukti bahwa *wadi'ah* rusak sendiri maka bukti *mudi'* lebih utama, karena ia lebih banyak penguatnya, karena ia punya penetapan atas kerusakan dan ada tambahan yaitu ada perbuatan melanggar batas dari *wadi'* kalau *wadi'* memberikan bukti atas pengakuan *mudi'* bahwa *wadi'ah* rusak, buktinya diterima maka penetapan ini mendustakan bukti *mudi'*.
5. Perihal Jaminan *Wadi'ah*

Pemindahan *wadi'ah* dari amanah kepada sesuatu yang harus dijamin karena beberapa sebab berikut.¹⁵

- a. Kalau *wadi'* meninggalkan penjagaan *wadi'ah* karena adanya akad ia harus komitmen dalam menjaga *wadi'ah*, kalau ia tinggalkan penjagaan sampai *wadi'ah* rusak maka ia harus

¹⁴ al-bada'i:6/210, Takmilah Fathul qodir:7/89, al-Kitab ma'a lubab:2/196, Majma' adhdhomanat:65, 87, 89, Hasyiah Ibnu Abidin:4/516, Mughni muhtaj:3/81, Qalyubi dan Umairah:3/182, alMughni:6/382

¹⁵ al-Bada'i:6/211, Takmilah Fathul qodir:7/91, al-Mabsuth:11/113, Majma' ash-dhomanata:68

meninggalkan khianat maka dia tetap tidak terbebas dari jaminan, karena *wadi'ah* kalau sudah menjadi yang dijamin maka terangkatlah akad *ida'* yang pertama, karena telah berubah dari tabiatnya, dan dia tidak kembali seperti semula, kecuali dengan adanya pembahasan akad, dan ini tidak didapat maka sama dengan dia mengingkari *wadi'ah* yang diakuinya.¹⁹

c. Pemakaian *wadi'ah*

Kalau *wadi'* memanfaatkan *wadi'ah*, baik dengan dikendarai, seperti hewan dan baju maka ia harus menjamin, kalau ia tidak memakainya, maka jumhur Hanafiyah mengatakan sebagaimana kaedah mereka bahwa ia tidak menjamin, karena ia memegang atas izin pemiliknya maka sama seperti sebelum dia pakai.²⁰

Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa kalau *wadi'ah* rusak/binasa sesudah dipakai maka ia harus menjaminnya walaupun rusaknya disebabkan oleh alam, karena dengan dipakainya *wadi'ah* terangkatlah hukum *wadi'ah* dan amanah maka sama dengan kalau ia mengingkari *wadi'ah* kemudian ia mengakui maka ia tidak bebas dari jaminan kecuali dengan pengembalian kepada pemilik, sebagaimana yang sudah diterangkan.²¹

d. Membawa *wadi'ah* melakukan perjalanan

Abu Hanifah mengatakan bahwa *wadi'* boleh membawa *wadi'ah* melakukan perjalanan kalau terjamin keamanannya dan pemilik *wadi'ah* tidak melarangnya, misalnya dengan akad yang mutlak karena akad *wadi'ah* mutlak tanpa ada penentuan tempat tertentu, penentuan itu harus dengan dalil, kalau ia melakukan perjalanan dengan *wadi'ah* dan lalu rusak/binasa maka ia tidak perlu menjamin.

¹⁹ Mughnil Muhtaj:3/90

²⁰ al-bada'i:6/211, al-Mabsuth:11/123

²¹ Mughnil Muhtaj:op.cit., 3/88, al-Muhazzab:1/362, Hasyiah Dasuqi:4/420, al-Qowanin al-Fiqhiyah:374, al-Mughni:6/401

Dua sahabat Abu Hanifah mengatakan bahwa kalau *wadi'ah* membutuhkan biaya ia tidak boleh membawanya karena, kalau ia bawa melakukan perjalanan akan ada *mudharat* bagi pemilik, karena adanya kemungkinan ia meninggal dalam perjalanannya maka tentu pemiliknya akan membutuhkan biaya lebih besar lagi untuk mengembalikannya maka tentu ini *mudharat* baginya, dan ini berbeda kalau *wadi'ah* tidak membutuhkan biaya.²²

Malikiyah mengatakan bahwa *wadi'ah* tidak berhak membawanya melakukan perjalanan kecuali kalau diperbolehkan padanya waktu perjalanan, kalau ia ingin melakukan perjalanan maka ia harus menitipkannya pada orang yang bisa dipercaya dan amanah di daerah itu, dan ia tidak menjaminnya walaupun ia sanggup memberikannya pada hakim atau tidak.²³

Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa *wadi'ah* tidak boleh membawa *wadi'ah* dalam perjalanan. Kalau ia ingin melakukan perjalanan maka, ia harus mengembalikan kepada pemiliknya atau wakilnya, kalau ia sanggup. Sedangkan, kalau ia tidak sanggup misalnya ia tidak menemukan pemiliknya maka ia harus menyerahkan pada hakim, karena pemegangannya atas *wadi'ah* hanyalah atas kebbaikannya sendiri maka tidak harus *wadi'ah* selamanya berada padanya. Dan hakim sebagai pengganti pemiliknya ketika ia tidak ada dan kalau ia bawa bepergian, ia harus menjaminnya karena ia membuat kemungkinan menjadi hilang/rusak. Pemeliharaan pada waktu bepergian bukan seperti pemeliharaan pada waktu menetap, walaupun keadaan jalan aman atau dikhawatirkan tidak aman.²⁴ Rasulullah bersabda, "musafir dan hartanya punya kemungkinan rusak kecuali apa yang dijaga Allah".

²² al-bada'i:6/209, Takmilah Fathul qodir:7/93, Hasyiah Ibnu Abidin:4/521, al-Mabsuth:11/122, Majma' adh-dhomanat:69

²³ Bidayatul Mujtahid:2/307, Hasyiah Dasuqi:3/421, 423

²⁴ mughnil Muhtaj:3/82, al-Muhazzab:1/361, al-qowanin al-Muhiith:1/183

Artinya, mungkin bisa rusak/binasa. (HR. Salafi. Lihat al-TAlkhish al-Habir:273, Kasyfal-Khafa oleh al-Jailani:255).

e. Peningkaran atas *wadi'ah*

Jika *mudi'* minta *wadi'ah* dan *wadi'* mengingkarinya atau ia tahan sedangkan ia sanggup untuk menyerahkannya karena, ketika ia minta agar *wadi'ah* dikembalikan maka artinya ia juga telah melemparkan *wadi'ah* dari tugas penjagaan maka kalau ia masih menahan berarti ia merampas dan melarang. Maka ia harus menjamin kalau *mudi'* memberikan bukti atas penitipan, atau *wadi'* enggan untuk bersumpah, atau ia mengakui adanya *wadi'ah*, kalau ia mengingkari adanya *wadi'ah* kemudian mengakui, ia tidak bebas dari jaminan karena akad sedang terangkat.

Kalau ia (*wadi'*) mengingkari *wadi'ah* kemudian *wadi'* memberikan bukti rusaknya *wadi'ah* maka ada tiga bentuk ketentuan, yaitu

- (1). kalau ia mendatangkan bukti bahwa *wadi'ah* rusak/binasa sesudah ia ingkari atau mutlak maka bukti itu tidak bermanfaat karena akad sudah terangkat dengan adanya peningkaran darinya, atau ia berada di tangannya maka ia harus menjaminnya;
- (2). kalau ia mendatangkan bukti bahwa *wadi'ah* rusak sebelum peningkaran darinya maka bukti bisa diterima dan ia tidak menjamin karena rusak/binasanya sebelum peningkaran membuat berubahnya akad;
- (3). kalau ia mendakwa rusak/binasa sebelum peningkaran dan meminta sumpah dari *mudi'* maka qadhi bersumpah untuknya "demi Allah, dia tidak tahu bahwa *wadi'ah* binasa sebelum peningkarannya" jika, dia bersumpah maka diputuskan bahwa ia menjamin dan kalau ia tidak mau maka diputuskan atasnya bebas.²⁵

²⁵ al-mabsuth:11/116, al-Bada'i:6/212, Takmilah Fathul qodir:7/93, majma' adh-dhomanat:84



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

kan kepada pemiliknya karena ini adalah zat barangnya sendiri dan "barang siapa yang mendapatkan zat dari barangnya sendiri (miliknya) maka ia lebih berhak atasnya", ini yang dikatakan oleh Rasulullah;²⁷ dan

- (2). kalau zatnya sendiri tidak diketahui maka ia harus menjamin dan menjadi utang pada peninggalannya, karena ketika ia meninggal dan tidak menjelaskan *wadi'ah* maka sama dengan telah menghilangkan dan merusaknya, dengan ini maka setiap amanah menjadi sesuatu yang harus dijamin dengan kematian dan barang amanah itu tidak jelas, kecuali pada tiga keadaan, yaitu
- a. jika meninggal penjaga harta wakaf dan tidak menjelaskan keuntungan harta wakaf itu;
 - b. kalau *qadhi* meninggal dan tidak menerangkan kepada siapa ia titipkan harta anak yatim;
 - c. kalau hakim meninggal dan tidak menerangkan kepada siapa ia menitipkan harta *ghanimah*.²⁸

Sementara itu, ulama lain menyatakan seperti apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah, kalau tidak sanggup memisahkan antara *wadi'ah* atau sangat sulit sekali, seperti bercampurnya dirham dengan dirham, mentega dengan mentega, minyak dengan minyak, baik ia mencampurnya dengan yang semisal atau yang bukan sejenis, atau bahkan lebih baik darinya dari jenisnya atau dari lain jenis maka *wadi'* harus menjaminnya, karena *mudi'* tidak ridha akan hal itu, kecuali apa yang dikatakan Malikiyah bahwa jika pencampuran dengan yang semisalnya, seperti gandum dengan yang semisalnya, dinar dengan yang semisalnya

²⁷ diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud serta Nasi'i, dari Hasan dari Samrah. Lihat Nailul author:5/240

²⁸ al-asybah wa Nazair, Ibnu Najim:2/67, Fathul Qadir:5/27



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

1. Menitipkan pada orang lain tanpa uzur.
2. Melalaikan pemeliharaan atau memberi kemudahan kepada pencuri.
3. Menyalahi cara pemeliharaan yang sudah disepakati walau ada tempat yang terjamin sama dengan tempat yang disepakati.
4. Mencampurnya dengan yang lain sehingga tidak bisa dibedakan.
5. Pemanfaatan *wadi'ah* ketika dia berkhianat maka dia tidak menjadi *wadi'ah* kecuali dengan akad yang baru.

Hukum-hukum *furu'* (cabang-cabang) dari hukum *wadi'ah*

Ibnu Jizzi Al Maliki menyebutkan beberapa hukum-hukum *furu'* dari hukum *wadi'ah* sebagai berikut.

1. Memperdagangkan *wadi'ah*, kalau *wadi'ah* diperdagangkan maka keuntungan halal baginya. Abu Hanifah mengatakan bahwa keuntungan jadi sedekah. Suatu kaum mengatakan keuntungannya bagi pemilik *wadi'ah*.
2. Meminjamkan *wadi'ah*, barang siapa yang meminjamkan *wadi'ah* kalau berbentuk barang maka makruh. Asyhab membolehkannya kalau dia bisa menutupinya. Kalau berbentuk '*aradh* (selain makanan dan emas/perak) maka tidak boleh kalau dari yang bisa ditakar atau ditimbang seperti jenis makanan padanya ada dua pendapat yang berbeda, apakah makanan sama hukumnya dengan uang atau '*aradh*.
3. Perbedaan pada *wadi'ah*, kalau pemilik menuntut *wadi'ah* dari *wadi'* kemudian *wadi'* mengatakan sudah rusak/binasa maka perkataan yang benar adalah perkataanya beserta sumpah, begitu juga kalau dia mendakwakan sudah mengembalikan kecuali pemegangannya memakai bukti maka perkataan telah mengembalikan tidak bisa diterima kecuali dengan bukti. Ibnu Qasim, Abu Hanifah, dan Syafi'i mengatakan bahwa perkataan yang benar adalah perkataannya (*wadi'*) walaupun dipegang dengan memakai bukti.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

terhadap pinjaman yang ada bunga telah tetap. Ini adalah permasalahan yang sudah diketahui secara umum dalam *fiqh* dalam hal *safatij*. (*safatij* : jama dari *suftajah*, bahasa Parsi).⁷⁰

Demikian juga, tidak boleh bagi pelaksana memberikan harta pada orang lain untuk *mudhorobah* atau berserikat dengannya. Atau mencampurkannya dengan hartanya sendiri atau dengan harta orang lain kecuali, jika pemiliknya mengatakan "kerjakanlah menurut pendapatmu", atau ia memberi izin pengelolaannya. Adapun *mudhorobah* tidak boleh, karena mirip seperti *mudhorobah* yang pertama, jika sesuatu itu tidak mengikuti yang sepertinya maka tidak boleh mengambil bunga dengan mutlak akad *mudhorobah* semisalnya, seperti wakil tidak memiliki perwakilan dengan mutlak akad. Adapun syarikat maka lebih tidak boleh lagi memilikinya dengan mutlak akad karena hal itu, lebih umum dari *mudhorobah* dan sesuatu tidak diikutinya semisalnya. Maka apa yang di atasnya lebih tidak boleh lagi dan adapun pencampuran atau penggabungan harta wajib dalam harta pemilik harta sebagaimana bagi yang lainnya maka tidak boleh kecuali dengan seizinnya.⁷¹

4. *Mudharib* mengulang *Mudhorobah*nya

Pertama, madzhab Hanafi berpendapat tidak boleh bagi *mudharib* mengulang *mudhorobah* harta itu dengan orang lain, kecuali diizinkan oleh pemilik harta. Jika, *mudharib* memberikan harta pada yang lain sebagai *mudhorobah* dan ada izin dari pemilik harta itu, menurut Abu Hanifah dijamin oleh *mudharib* yang pertama walaupun sudah menyerahkan harta pada yang kedua, dan tidak ada penjelasan *mudharib* yang kedua sampai beruntung. Jika, beruntung maka *mudharib* pertama menjamin untuk pemilik harta. Adapun sebelum beruntung maka tidak

⁷⁰ Qawanin Fiqhiyah:251, Ghayatul Muntaha:2/167

⁷¹ al-bada'i:6/90, Takmilah Fathul Qodir:7/64, al-durr al-Mukhtaar :4/507



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Aturan-aturan hukum pemilik rekening investasi dan setaranya

Terjemahan bebas dari *Financial Accounting Standard No 6 (Juristic rules of Equity of Investment Account Holders and Their Equivelent) - Accounting, Auditing and Governance Standard for Islamic Financial Institution (2001)*, yang dikeluarkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial institutions*

1. Aspek-aspek hukum secara umum yang signifikan dari para pemilik rekening investasi

1.1 Ciri-ciri hukum dari para pemilik rekening investasi

Ciri-ciri hukum dari *equity* para pemilik rekening investasi adalah modal pada saat akad *mudharabah*. Bank Islam memobilisasi dana-dana rekening investasi tersebut untuk diinvestasikannya dan keuntungan yang dihasilkan dibagi antara para pemilik rekening ini dengan bank Islam sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Di dalam konteks ini, bank Islam adalah *mudharib* dan para pemilik rekening investasi adalah penyedia dana.

1.2 Perbandingan antara para pemilik rekening investasi dan para pemilik dana-dana lain yang diterima bank Islam

Current account dan setaranya misalnya *cash margin fund* maupun dana-dana lain yang diterima bank Islam atas dasar selain akad *murabahah* dan bercampur dengan dana-dana bank Islam sendiri, dan pokoknya dijamin oleh bank Islam, dari segi syari'ah dianggap sebagai suatu pinjaman



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah

Bagaimana karakteristik bank syariah? Di Indonesia karakteristik bank syariah tergolong masih baru. Kalau bank konvensional deposan memberikan dana kepada bank yang dijanjikan bunga tertentu dan tidak menanggung risiko. Artinya, bank konvensional bisa menyalurkan dana atau tidak, mendapatkan penghasilan besar atau tidak deposan akan menerima bunga tetap yang dijanjikan.

Namun, yang dilakukan oleh bank syariah khususnya yang berkaitan dengan penyaluran dana akan membawa dampak atau risiko kepada pemilik dana (*shahibul maal*) dari dana yang dihimpun deposan atau penabung. Perhitungan pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh bank syariah dapat mengubah paradigma bahwa bagi hasil usaha tidak sama dengan bunga bank walaupun perhitungannya dilakukan dengan mempergunakan presentase.

Penulis buku ini adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti dan tenaga ahli perbankan syariah. Oleh karena itu, mahasiswa, dosen fakultas ekonomi, dosen fakultas ilmu sosial dan politik sudah selayaknya memiliki buku ini. Praktisi bank dan para wirausaha sangat dianjurkan membaca buku ini.

Grasindo
GRAMEDIA WIDIASARANA INDONESIA

Penerbit PT Grasindo

Jl. Palmerah Selatan 22-28, Jakarta 10270

Telp. (021) 53696545, Fax. (021) 5491412

www.grasindo.co.id

Desainer sampul: Nova Pradana

ISBN 979-759-197-2



9 789797 14591977



501 05 338

Bahan dengan hak cipta